**Kesejahteraan Petani Jambi Menurun Lagi, tetapi Terbaik Se-Sumatera**

Penulis : Budi Hartono, S.ST., M.Si.

Statistisi, BPS Provinsi Jambi

Hari ini (01/08/2022) BPS merilis berbagai indikator strategis bulanan, salah satu yang menarik perhatian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP kembali menurun dalam tiga bulan terakhir, tetapi di bulan Juli 2022 menjadi yang terbaik dari semua provinsi se-Sumatera, yang sebelumnya dinikmati oleh petani dari Provinsi Riau.

NTP Provinsi Jambi Mei 2022 sebesar 131,50 atau turun 8,60 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kemudian bulan Juni 2022, NTP sebesar 127,31 atau turun 3,18 persen dibanding NTP bulan Mei. Lalu, bulan Juli 2022 NTP sebesar 119,74 atau turun 5,95 persen dibanding NTP bulan Juni. Penurunan NTP bulan Mei 2022 sepertinya menjadi penurunan nilai NTP tertinggi yang pernah terjadi di Provinsi Jambi.

NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar *(terms of trade)* dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Apa yang menyebabkan NTP Mei-Juli 2022 Provinsi Jambi mengalami penurunan sedemikian besar?

Penurunan NTP Mei 2022 di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh turunnya NTP di tiga (3) subsektor pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,20 persen; Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 0,23 persen; dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 10,17 persen. Sementara itu, Subsektor Peternakan mengalami kenaikan sebesar 1,46 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 0,19 persen.

Penurunan NTP Juni 2022 dipengaruhi oleh turunnya NTP di empat (4) subsektor pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,19 persen; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 4,62 persen; Subsektor Peternakan sebesar 1,64 persen; dan Subsektor Perikanan sebesar 1,75 persen. Sementara itu, Subsektor Tanaman Hortikultura mengalami kenaikan sebesar 17,96 persen.

Penurunan NTP Juli 2022 dipengaruhi oleh turunnya NTP di empat (4) subsektor pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,98 persen; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 7,53 persen; Subsektor Peternakan sebesar 0,54 persen; dan Subsektor Perikanan sebesar 0,70 persen. Sementara itu, Subsektor Tanaman Hortikultura mengalami kenaikan sebesar 6,75 persen.

Bisa terlihat di sana bahwa, penurunan indeks terbesar terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, yaitu turun sebesar 10,17 persen di bulan Mei, lalu turun 4,62 persen di bulan Juni, dan turun lagi 7,53 persen di bulan Juli 2022. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap NTP Mei-Juli 2022 Provinsi Jambi yang turun dengan perubahan yang cukup besar.

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi pertanian. Melalui Ib dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

Pada Mei 2022 Provinsi Jambi terjadi penurunan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 10,17 persen. Hal ini terjadi karena It turun sebesar 9,73 persen, sedangkan Ib naik sebesar 0,50 persen. Penurunan It Mei 2022 disebabkan oleh turunnya indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya komoditas kelapa sawit, karet, kopi, dan kelapa. Sementara itu, indeks Konsumsi Rumah Tangga dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen.

Pada Juni 2022 terjadi penurunan NTPR sebesar 4,62 persen. Hal ini terjadi karena It turun sebesar 3,26 persen, sedangkan Ib naik sebesar 1,43 persen. Penurunan It Juni 2022 disebabkan oleh turunnya indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya komoditas kelapa sawit, pinang, kakao, dan kopi. Kenaikan yang terjadi pada Ib disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT sebesar 1,74 persen sedangkan indeks kelompok BPPBM mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen.

Pada Juli 2022 terjadi penurunan NTPR sebesar 7,53 persen. Hal ini terjadi karena It turun sebesar 6,54 persen, sedangkan Ib naik sebesar 1,08 persen. Penurunan It Juli 2022 disebabkan oleh turunnya indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya komoditas kelapa sawit, pinang, kopi, dan kelapa. Kenaikan yang terjadi pada Ib disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT sebesar 1,26 persen sedangkan indeks kelompok BPPBM mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen.

**(Masih) Efek Pelarangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng**

Beberapa waktu lalu, Pemerintah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Aturan ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein) dan Used Cooking Oil (UCO).

Presiden Joko Widodo memandang kebutuhan minyak goreng dalam negeri merupakan prioritas. Beliau mengakui kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng tersebut dapat berdampak negatif, di antaranya pengurangan produksi dan hasil panen sawit petani yang tidak terserap. Jadi larangan ekspor bahan baku minyak goreng sangat berdampak terhadap pendapatan yang diterima oleh petani sawit, hal ini terlihat dari indeks yang diterima petani sawit turun hingga 16,67 persen bulan Mei dibanding bulan sebelumnya, lalu kembali turun 7,19 persen dibanding bulan sebelumnya, dan bulan Juli turun sebesar 15,28 persen dibandingkan bulan Juni 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022. Dalam konferensi pers secara virtual, Jokowi mengatakan ada tiga penyebab mengapa ia akhirnya membuka lagi keran ekspor CPO dan minyak goreng.

Salah satunya adalah Jokowi mempertimbangkan belasan juta tenaga kerja yang mencari rezeki di industri sawit. Mereka terdampak karena ekspor CPO dilarang. Pencabutan larangan izin ekspor CPO dan minyak goreng ini tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari banyak pihak, baik petani maupun pengusaha.

Sejak awal, yang menjadi masalah kelangkaan minyak goreng adalah dari sisi distribusi. Dari produsen ke konsumen ada *bottleneck*, tapi kemudian respon pemerintah malah fokus di hulu, seolah-olah pasokannya kurang. Kebijakan pemerintah yang fokus pada hulu, malah membuat banyak masalah seperti harga Tandan Buah Segar (TBS) yang turun hingga anjloknya pendapatan petani.

Kebijakan pencabutan pelarang CPO dirasa sudah tepat, sehingga masalah di hulu bisa diredam karena itu berpacu dengan waktu. Yang perlu dibereskan itu di hilir, pertama dengan terus melakukan investigasi. Kedua jangka pendek, pemerintah bisa menyalurkan (minyak goreng) dalam cara yang tepat.

Tanpa adanya perbaikan distribusi maka harga minyak goreng masih akan tinggi dan faktor pengusaha akan gunakan acuan pasar untuk menentukan harga minyak goreng khususnya minyak goreng kemasan. Usai ekspor CPO dibuka kembali, pemerintah perlu fokus pada pengendalian harga minyak goreng.

Pencabutan larangan ekspor CPO adalah bukti bahwa pengendalian harga minyak goreng melalui kebijakan tersebut adalah kesalahan fatal. Saat ini, harga minyak goreng khususnya kemasan di level masyarakat masih tinggi. Di sisi lain petani sawit dirugikan dengan harga TBS yang anjlok karena over supply CPO di dalam negeri.